

Ringkasan **Proyek**



Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (UN Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities - UNPRPD)

Tujuan Pembangunan	Diadopsinya kebijakan lanjutan terkait hak-hak penyandang disabilitas yang dipromosikan melalui lembaga disabilitas yang lebih kuat dan pengumpulan data yang lebih baik.
Tujuan Langsung:	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kerjasama antara organisasi penyandang disabilitas dengan lembaga pemerintah terkait. 2. Peningkatan kapasitas pengumpulan data tentang penyandang disabilitas agar dapat menyusun rencana dan anggaran yang efisien.
Mitra Utama	■ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ■ Kementerian Sosial ■ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Kementerian Kesehatan ■ Badan Pusat Statistik (BPS) ■ Organisasi Penyandang Disabilitas
Jangka Waktu	1,5 tahun (2013–2014)
Cakupan Geografis	Proyek ini akan dilaksanakan terutama di tingkat nasional, tapi juga melaksanakan kegiatan di tingkat provinsi (antara lain Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat).
Referensi Program Nasional	Mengembangkan respons nasional terhadap tantangan yang diidentifikasi lembaga perjanjian internasional dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi di dunia kerja.
Lembaga Pelaksana	ILO dan UNESCO untuk Tujuan Langsung 1 WHO dan UNFPA untuk Tujuan Langsung 2
Donor	UN Partnership to promote the Rights of Persons with Disabilities Multi-Donor Trust Fund
Anggaran	324.747 USD untuk UNPRPD di Indonesia
Kontak	Yohanis Pakereng Koordinator Proyek yohanis@ilo.org

Latar Belakang Proyek

Pada tahun 2011, enam badan PBB (ILO, WHO, UNDP, OHCHR, UNICEF dan UN DESA) membentuk UN Partnership on the Rights of Persons with Disabilities (UNPRPD)—sebuah dana amanah multi-donor (MDTF) untuk mendukung kerjasama antar lembaga PBB dalam program-program di tingkat negara agar dapat mempromosikan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Tujuan UNPRPD adalah mengembangkan kapasitas pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional, terutama pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas, untuk melaksanakan secara efektif Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCPRD). Salah satu negara pertama yang melaksanakan program UNPRPD ini adalah Indonesia.

Kendati belakangan ini pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak penyandang disabilitas, setelah meratifikasi UNCPRD pada November 2011, namun masih sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas, serta kelembagaan disabilitas yang lebih kuat. Karenanya, proyek ini difokuskan pada upaya menciptakan lembaga yang berkemampuan dan inklusif, dan membantu BPS memperkuat penyediaan data yang lebih akurat terkait penyandang disabilitas.

Di Indonesia, proyek ini akan dilaksanakan bersama oleh ILO, WHO, UNESCO dan UNFPA.

Strategi Proyek

Untuk saran kebijakan dan bantuan kepada pemerintah yang lebih efektif dan terfokus dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas, dibutuhkan adanya lembaga-lembaga penyandang disabilitas yang lebih kuat serta pengumpulan dan ketersediaan data yang lebih baik. Guna mendukung pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas, semua lembaga pelaksana akan menjadi bagian dari kegiatan, serta membantu mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas sesuai mandat masing-masing.

I. Pengembangan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas dan Lembaga Pemerintah (Badan pelaksana: ILO dan UNESCO)

ILO dan UNESCO akan mengadakan konsultasi dan pembangunan kapasitas teknis serta fungsional organisasi penyandang disabilitas dan pegawai pemerintah. Bantuan akan diberikan melalui serangkaian pelatihan bagi organisasi penyandang disabilitas dan pegawai pemerintah di tingkat nasional dan provinsi, termasuk Jabodetabek, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sejumlah lokakarya peningkatan kesadaran mengenai UNCPRD akan diadakan dengan fokus pada pendidikan inklusif, hak atas pekerjaan dan bekerja, serta hak untuk berpartisipasi. Bidang tematis dari peningkatan kapasitas dalam bentuk



pelatihan ini mencakup pendidikan keuangan dan penyusunan anggaran; pembuatan laporan, serta pemantauan dan evaluasi; komunikasi, negosiasi dan presentasi, advokasi, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat.

II. Pengembangan kapasitas dan pengumpulan data tentang penyandang disabilitas (Badan pelaksana: WHO dan UNFPA)

Pengembangan dan peningkatan data dan statistik tentang penyandang disabilitas merupakan kunci dari pembuatan kebijakan yang efektif. Untuk membantu pembuatan kebijakan, perencanaan dan penyusunan anggaran, proyek ini akan membantu BPS meningkatkan kemampuan pengumpulan data tentang penyandang disabilitas. Metodologi Indonesia saat ini terkait survei penyandang disabilitas akan dikaji, dan metodologi standar internasional akan dikembangkan bersama BPS. Bantuan akan diberikan dalam bentuk lokakarya – antara lain tentang metodologi pengumpulan data nasional tentang penyandang disabilitas – dan uji lapangan.

Hasil yang dirumuskan

Pengembangan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas dan Lembaga Pemerintah

- ♦ Menyusun rencana strategis bagi organisasi payung penyandang disabilitas agar dapat menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya;
- ♦ Serangkaian pelatihan untuk organisasi penyandang disabilitas tentang UNCPRD dan kapasitas organisasi;
- ♦ Membentuk komite penasihat yang mengoordinasikan permasalahan dan program disabilitas antar lembaga pemerintah;
- ♦ Melakukan pelatihan tentang UNCPRD bagi pejabat pemerintah kunci; dan
- ♦ Mengadakan penelitian kualitatif khususnya mengenai penyandang disabilitas perempuan dan kekerasan terhadap perempuan.

Pengembangan Kapasitas Pengumpulan Data tentang Penyandang Disabilitas

- ♦ Mengintegrasikan satu set pertanyaan umum tentang disabilitas ke dalam metodologi survei mendasar;
- ♦ Melaksanakan Pelatihan teknis bagi staf kunci BPS tentang hak-hak penyandang disabilitas dan metodologi pengumpulan data; dan
- ♦ Melaksanakan uji lapangan dan pelatihan untuk pelatih tentang survei di salah satu provinsi.

Di samping itu, penelitian kualitatif khususnya tentang penyandang disabilitas perempuan dan kekerasan terhadap perempuan akan diadakan.